

Bali Salah Satu Destinasi Favorit Backpacker Swedia

DENPASAR (IM)- Pulau Dewata menjadi salah satu tujuan wisata favorit wisatawan asal Swedia. Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg menyebut, pelancong dari negaranya umumnya para backpacker.

"Pada umumnya, orang Swedia suka sekali ke Bali, terutama backpacker," kata dalam konferensi pers daring, Kamis (18/11).

Marina menuturkan, rata-rata masyarakat Swedia memang suka melancong dan pulau Bali serta Indonesia adalah salah satu tujuan favorit. Dia yakin para wisatawan asal Swedia telah rindu menikmati waktu di pulau tersebut setelah pandemi berdampak besar terhadap industri pariwisata dunia akibat perjalanan yang dibatasi.

Marina juga berpendapat situasi di Bali telah cukup aman untuk berwisata. Pihak kedutaan besar Swedia di Indonesia dan kedutaan besar Indonesia di Swedia juga senantiasa saling bertukar informasi dan memasarkan pariwisata masing-masing di negaranya.

Swedia menjadi salah satu negara yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penerbangan internasional ke Bali. Ke 19 negara tersebut ialah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, (UAE), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Negara-negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) karena angka kasus terkonfirmasi Covid-19-nya berada pada level 1 dan 2, dengan angka positivity rate yang rendah. Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyatakan kesiapan dalam menyambut kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang akan menikmati momen Natal hingga pergantian tahun dengan melakukan pengetatan di 94 objek wisata.

Terkait masa karantina bagi wisman yang semula diberlakukan selama tiga hari, pihaknya kini mengusulkan kepada pemerintah pusat agar masa karantina bagi turis asing hanya satu hari, demi menajring minat para wisman berlibur ke Bali. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Provinsi Bali juga mengusulkan lima negara tambahan setelah 19 negara yang sudah diizinkan masuk ke Indonesia, khususnya Bali.

Kelimitya adalah Australia, Amerika Serikat, Rusia, Jerman dan Inggris. Selain penerapan standard operating procedure bagi wisman, pihaknya juga melakukan pengetatan di objek wisata di Bali yang sudah mempunyai Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability). ● **pra**



MENTERI PUPR TINJAU DAS SINTANG

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) memberikan bantuan sembako untuk korban banjir di tepian Sungai Kapuas di Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (18/11). Menteri PUPR menyatakan pihaknya siap melakukan rekayasa untuk penanganan banjir di Kabupaten Sintang, terutama menghadapi prediksi banjir besar yang akan terjadi pada Januari 2022.

Tak Diberi Uang Lingkungan, Oknum RW di Karang Tengah Segel PAUD

Bangunan posyandu yang dijadikan tempat belajar anak-anak merupakan aset resmi Pemerintah Kota Tangerang. "Kita bersinergi dan sudah tercatat resmi di pemerintah," kata Pengurus PAUD.

TANGERANG (IM)- Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menempati bangunan Posyandu Anyelir, Kota Tangerang terpaksa berhenti. Penyebabnya, salah satu pengurus RW meminta uang lingkungan sebagai syarat PTM boleh digelar.

B, salah satu pendidik di PAUD itu mengatakan, belasan anak tidak bisa belajar akibat ruangan kelas ditutup oleh pengurus RW. PAUD tersebut memang sejak awal berdiri menumpang di bangunan Posyandu Anyelir yang berada di Perumahan Griya Kencana I, RW 04 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah,

Kota Tangerang.

Pengurus PAUD diminta perwakilan pengurus RW setempat uang senilai Rp750 ribu agar bisa melaksanakan PTM terbatas di Posyandu tersebut. Padahal lanjut B, kegiatan pendidikan di sekolah PAUD tersebut, telah berjalan selama 11 tahun dan tidak pernah menemui permasalahan lingkungan oleh warga sekitar.

"Ini sudah 11 tahun berjalan tapi baru kali ini diminta oleh oknum itu. Jelas kami menolak memberikan uang itu," ungkap dia saat ditemui, Kamis (18/11).

Dia juga menengakan, bangunan posyandu yang dijadikan tempat belajar anak-anak

merupakan aset resmi Pemerintah Kota Tangerang. "Kita bersinergi dan sudah tercatat resmi di pemerintah. Lalu uang ini untuk apa? Ini kan gedung pemerintah," tukasnya.

Pihak sekolah berharap, penutupan ruang kelas yang membuat belasan anak PAUD telantar bisa menjadi perhatian pemerintah setempat.

"Kami membantu mencerdaskan anak bangsa bukan mau berbisnis. Jadi tolong pemerintah bisa menindak oknum ini," pungkasnya.

Camat Buka Suara

Camat Karang Tengah, Tangerang, Malkan Al Masqo buka suara terkait penutupan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Perumahan Griya Kencana I, RW 04, Kelurahan Pedurenan itu. Dia berdalih ruangan itu tidak sengaja tertutup karena kuncinya terbawa pejabat RW.

"Sebenarnya bukan ditutup, karena kurang komunikasi antara yang bawa kunci sama ibu-ibu PAUD. Insya Allah, karena ini hanya kunci saja.

Kalau ada kunci, kita langsung coba buka dan klir lah besok. Cuma kurang komunikasi saja antara pengurus PAUD dengan RW di sini," kata Malkan di Perum Griya Kencana I, Kota Tangerang, Kamis (18/11).

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak PAUD dan pengurus lingkungan setempat. Namun saat ini ketua RW sedang tidak berada di lingkungan itu, karena sedang berkegiatan di Puncak, Bogor.

"Sepakat bahwa semua akan PTM kembali, belajar lagi. Sebenarnya enggak ada masalah, belajarnya kan tidak harus di ruangan. Di lapangan terbuka enggak apa-apa. Yang pasti kan baru dua hari PTM di PAUD ini. Hari pertama masih belum klir dan insya Allah hari kedua sudah selesai," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai uang sebesar Rp750 ribu yang diduga diminta oknum pengurus RW, Camat Karang Tengah menyatakan akan menelusuri informasi itu.

"Saya juga belum jelas,

nanti kita coba cek kembali apakah bener ada pungutan atau cuma akan segeralah kita selesaikan urusan ini," ungkap dia.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Hendri memastikan kegiatan PTM terbatas di PAUD itu akan terus berjalan. "Terkait pembelajaran di PAUD ini kita usahakan akan tetap melakukan PTM, bisa di dalam ruangan bisa di luar. Karena memang metode-metode di PAUD ini bermacam-macam. Bisa metode pembelajaran alam, lingkungan dan lain hal," ucapnya.

Terkait adanya pelarangan, pihak Dindik Kota Tangerang menyerahkan kepada perangkat daerah setempat untuk menyelesaikannya. Mediasi antara pihak terkait akan dilaksanakan besok.

"Justru ranahnya itu, makanya saya tidak langsung datang ke lokasi, saya berkoordinasi dulu dengan Pak Camat dan Pak Lurah setempat karena terkait oknum RW," jelas dia. ● **pp**



PEMBONGKARAN RUMAH OLEH PT KAI DI BANDUNG

Petugas PT KAI (Persero) mengoperasikan alat berat saat melakukan penertiban lahan dan pembongkaran rumah di kawasan Jalan Anyer, Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/11). Sedikitnya 25 bangunan rumah harus dibongkar karena sudah dianggap sesuai aturan kepemilikan lahan oleh PT KAI yang ke depannya direncanakan menjadi akses area wisata dan pusat perbelanjaan.

Warga Kab. Tangerang Diminta Tidak Liburan Akhir Tahun ke Luar Kota

TANGERANG (IM)- Memasuki akhir tahun, warga Kabupaten Tangerang diminta untuk tidak liburan dulu ke luar kota saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hal ini untuk mencegah terjadinya Covid-19 gelombang ketiga akibat kluster liburan.

Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli. Menurutny, masyarakat sebaiknya di rumah saja menikmati liburan dengan keluarga.

"Untuk perintah resmi memang nanti perlu SK pimpinan daerah. Tetapi untuk mengantisipasi gelombang ke-3 sebaiknya saat libur panjang akhir tahun, masyarakat tidak pergi keluar kota, khususnya ASN kecuali memang ada tugas," katanya, Kamis (18/11).

Untuk mengantisipasi

terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19, selain dengan mengajak masyarakat tidak bepergian keluar kota, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menggenapkan program vaksinasi, sebagai salah satu alternatif untuk mencapai kekebalan kelompok.

"Kita terus cencarkan vaksinasi, agar benar-benar terbentuk herd immunity sehingga masyarakat benar-benar terbebas dari Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas penanganan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmidzi menambahkan, kini pihaknya telah menggenapkan vaksinasi dari pintu ke pintu di tingkat rukun warga sampai rukun tetangga. ● **pp**

Pemkab Lebak Gencar Lakukan Vaksinasi Dosis Satu dan Dua

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, gencar melakukan vaksinasi dosis satu dan dua guna mencegah munculnya penyebaran gelombang ketiga Covid-19.

"Kita berharap gelombang ketiga Covid-19 itu tidak terjadi jika semua warga divaksinasi," kata Bupati Lebak, Iti Octavia di Lebak, Kamis (18/11).

Masyarakat Kabupaten Lebak diimbau mewaspadai penyebaran gelombang ketiga Covid-19 yang dikhawatirkan terjadi pada Natal dan Tahun Baru 2022. Apalagi kegiatan mobilisasi masyarakat pada pergantian tahun baru dan Natal cenderung meningkat.

Pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi dosis satu dan dua untuk mempercepat target 70 persen dari satu juta warga Kabupaten Lebak yang menjadi sasaran vaksinasi.

Percepatan vaksinasi itu kini melalui program gebyar vaksinasi yang digulirkan pemerintah daerah pada 15-20 November 2021. Program tersebut melayani

vaksinasi dosis satu dan dua di tingkat kelurahan dan desa juga dari rumah ke rumah "Kami minta masyarakat sukseskan vaksinasi agar Indonesia terbebas Covid-19," katanya.

Menurut Bupati, vaksinasi wajib karena dapat melindungi diri sendiri, anggota keluarga dan orang lain dari penyebaran virus corona.

Vaksinasi itu, katanya, bermanfaat untuk kesehatan karena dapat mencegah Covid-19 juga persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga kemudahan berpergian ke luar daerah, seperti menggunakan angkutan juga lokasi perbelanjaan maupun wisata.

Sementara itu, warga Sentral Rangkasbitung mendukung program gebyar vaksinasi yang diluncurkan pemerintah daerah dengan melaksanakan pelayanan vaksinasi dosis satu dan dua.

"Kami hari ini divaksinasi dosis satu dan dilayani hingga ke rumah melalui program gebyar vaksinasi itu," kata Samsul, seorang warga Sentral Rangkasbitung Kabupaten Lebak. ● **pra**

Pemkab Lebak Terima 150 Alat Filter Air dari Aqua-Nazava

LEBAK (IM)- Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menerima kunjungan Tim Aqua-Nazava di Gedung Negara, Kamis (18/11). Kunjungan ini dalam rangka pemberian bantuan alat filter air minum kerjasama antara Danone dan Aqua Nazava untuk sekolah di Kabupaten Lebak.

Hadir dalam audiensi tersebut Asda 2, Aji Suhendi, Kepala Dinas Pendidikan, Wawan Ruswandi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Doddy Irawan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiono. Juga hadir perwakilan Aqua Ratih Anggracini, dan direktur Nazava Water Filter Guido van Hofvagen.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Aqua-Nazava atas inisiatifnya membantu Kabupaten Lebak dalam menyediakan kebutuhan air minum bagi para siswa. Dengan begitu siswa para siswa tidak mengalami dehidrasi dan tercukupi kebutuhan air minumnya agar bisa berkonsentrasi dengan baik.

Kerjasama ini diharapkan bisa berkelanjutan sehingga dapat

membantu masyarakat Lebak secara luas untuk memperoleh air minum yang bersih dan sehat.

"Kami mengucapkan terima kasih karena project ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak. Program ini memang dirasa kami butuhkan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi para siswa. Dengan begitu kesehatan siswa bisa lebih baik," ucap Bupati.

Danine bekerjasama dengan Aqua Nazava direncanakan akan menyediakan sejumlah alat filter air untuk 150 sekolah di Kabupaten Lebak. Filter air minum ini nantinya akan disimpan satu alat per-kelas. Guido menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan misi Nazava yaitu menyediakan air minum yang terjangkau bagi semua orang dan menciptakan generasi yang sehat.

"Kami sangat senang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lebak dan diterima dengan baik. Semoga alat ini dapat terus difungsikan dan membantu menciptakan generasi yang sehat dari air minum yang sehat," ungkap Guido. ● **pra**

Kejagung Ganti Aspidum Kejati Jabar Imbas Perkara KDRT di Karawang

BANDUNG (IM)- Kejaksaan Agung memutasikan Dwi Hartanta dari jabatannya sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) Jawa Barat, imbas dari adanya dugaan pelanggaran penanganan perkara kasus istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya di Karawang.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Leonard Simanjuntak mutasi itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021.

"Dwi Hartanta dimutasikan sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta (Anggota Satuan Tugas Khusus Penyusunan Kebijakan Strategis)," kata Leonard dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/11).

Selanjutnya, kata Leonard,

jabatan Aspidum diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yakni oleh Riyono. Saat ini, Riyono sendiri merupakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Jawa Barat.

"Di samping tugasnya sehari-hari sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung sampai dengan adanya pejabat definitif diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia," kata dia.

Menurutnya mutasi Dwi Hartanta itu sebagai bentuk pelaksanaan mutasi diagonal yang dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan fungsional Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

"Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, disebut bahwa pola karier pegawai dapat dibentuk horisontal,

vertikal dan diagonal," kata Leonard.

Adapun perkara istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya itu diduga terjadi pelanggaran pada penanganan perkara. Pasalnya, istri yang bernama Valencya alias Nengsy Lim itu diduga justru menjadi korban KDRT.

Sejauh ini sembilan orang jaksa baik dari Kejati Jabar maupun Kejaksaan Negeri (Negeri) Karawang termasuk Dwi Hartanta tengah menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas).

Dalam perkara tersebut, para jaksa yang menanginya dinilai tidak memiliki kepekaan dalam menangani perkara. Selain itu, baik Kejati Karawang maupun Kejati Jawa Barat juga dinilai tidak memedomani "Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung" sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas. ● **pur**



WAKSINASI COVID-19 UNTUK PEDAGANG DAN SOPIR ANGKOT

Petugas memeriksa kesehatan warga saat vaksinasi COVID-19 untuk pedagang dan sopir angkot di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Kamis (18/11). Pemda setempat menggenapkan vaksinasi di pasar-pasar untuk memberi kemudahan akses bagi para pedagang dan sopir angkot serta warga di sekitar lokasi yang belum mendapat vaksin COVID-19 guna mempercepat penuntasan pencapaian kekebalan komunal (Herd Immunity) dan Indonesia bebas COVID-19.

IDN/ANTARA

IDN/ANTARA

IDN/ANTARA